



Vol. 6 No. 1, Januari – April 2026

Copyright © 2026, is licensed under a CC-BY-NC-SA

Halaman: 317-338

Publisher: Islamic and Multicultural Education Foundation

<https://journal.yaspim.org/index.php/pendalas/index>

e-ISSN: 2807-7334

INTEGRASI KEBENARAN KOMUNIKASI DI ERA DIGITAL: SINTESIS FILSAFAT DAN EPISTEMOLOGI ISLAM

Azzura Zahra Salsabila

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, Indonesia

azzura3005253014@uinsu.ac.id

Muniruddin

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, Indonesia

muniruddin@uinsu.ac.id

Muktaruddin

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, Indonesia

muktaruddin@uinsu.ac.id

Received: 15 Maret 2026

Accepted: 22 April 2026

Published: 30 April 2026

Abstrak

Perkembangan komunikasi digital yang ditandai oleh penyebaran disinformasi, manipulasi pesan, fenomena pascakebenaran, dan penggunaan kecerdasan buatan telah menimbulkan persoalan epistemologis dan etis mengenai kebenaran informasi. Penelitian ini bertujuan menganalisis konsep kebenaran dalam ilmu komunikasi berdasarkan perspektif filsafat dan Islam serta merumuskan integrasi kedua perspektif tersebut dalam menghadapi tantangan komunikasi digital. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode riset kepustakaan melalui penelaahan buku, artikel jurnal, dokumen ilmiah, dan sumber akademik yang membahas teori kebenaran, filsafat komunikasi, epistemologi Islam, komunikasi Islam, dan komunikasi digital. Data dianalisis menggunakan analisis isi dan analisis tematik melalui tahapan identifikasi, klasifikasi, perbandingan, interpretasi, dan sintesis konsep. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perspektif filsafat menjelaskan kebenaran melalui teori korespondensi, koherensi, pragmatis, dan konsensus, sedangkan perspektif Islam memandang kebenaran sebagai *al-haqq* yang diwujudkan melalui prinsip kejujuran, amanah, verifikasi informasi, keadilan, dan tanggung jawab sosial. Integrasi kedua perspektif menghasilkan model kebenaran komunikasi yang terdiri atas dimensi faktual, rasional, dialogis, dan etis-transendental. Model ini menegaskan bahwa kebenaran komunikasi tidak hanya ditentukan oleh kesesuaian informasi dengan realitas, tetapi juga oleh rasionalitas, keterbukaan dialog, moralitas, dan orientasi kemaslahatan sosial.

Kata Kunci: Kebenaran Komunikasi, Filsafat, Epistemologi Islam, Komunikasi Digital, Etika.



Abstract

The development of digital communication, characterized by the spread of disinformation, message manipulation, post-truth phenomena, and the use of artificial intelligence, has created significant epistemological and ethical problems concerning the truthfulness of information. This study aims to analyze the concept of truth in communication science from philosophical and Islamic perspectives and to formulate an integration of both perspectives in addressing the challenges of digital communication. This study employed a qualitative approach using library research by examining books, journal articles, scientific documents, and academic sources related to theories of truth, communication philosophy, Islamic epistemology, Islamic communication, and digital communication. The data were analyzed through content and thematic analyses involving identification, classification, comparison, interpretation, and conceptual synthesis. The findings demonstrate that the philosophical perspective explains truth through correspondence, coherence, pragmatic, and consensus theories, while the Islamic perspective understands truth as *al-haqq*, manifested through honesty, trustworthiness, information verification, justice, and social responsibility. The integration of these perspectives produces a communication truth model comprising factual, rational, dialogical, and ethical-transcendental dimensions. This model emphasizes that truth in communication is determined not only by the correspondence between information and reality but also by rational consistency, openness to dialogue, moral responsibility, and commitment to social welfare.

Keywords: Communication Truth, Philosophy, Islamic Epistemology, Digital Communication, Ethics.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital telah mengubah komunikasi dari proses yang relatif terpusat menjadi arus informasi berjaringan, cepat, partisipatif, dan sulit dikendalikan. Media sosial, algoritma rekomendasi, kecerdasan buatan generatif, serta teknologi manipulasi audio-visual memungkinkan setiap pengguna memproduksi sekaligus menyebarkan pesan dalam skala luas, tetapi tidak selalu disertai mekanisme verifikasi yang memadai (Moreno Esparza, 2015). Kondisi tersebut melahirkan persoalan krusial berupa misinformasi, disinformasi, *deepfake*, propaganda digital, polarisasi, dan menguatnya budaya *post-truth*, yaitu keadaan ketika emosi dan keyakinan kelompok lebih menentukan penerimaan informasi daripada fakta objektif (McIntyre, 2018). Penelitian Vosoughi et al (2018) menunjukkan bahwa berita palsu di media sosial menyebar lebih jauh dan lebih cepat dibandingkan berita benar, sedangkan McLoughlin et al (2024) menemukan bahwa muatan kemarahan memperbesar kemungkinan penyebaran misinformasi. Secara praktis, fenomena ini mengancam kepercayaan publik, kohesi sosial, proses demokrasi, dan kualitas pengambilan keputusan; secara akademik, fenomena tersebut menuntut ilmu komunikasi meninjau kembali dasar epistemologis dan etis yang digunakan untuk menentukan kebenaran pesan (WEF, 2024).

Kajian terdahulu telah membahas persoalan kebenaran komunikasi melalui beberapa jalur pemikiran. Literatur filsafat komunikasi menjelaskan kebenaran berdasarkan teori



korespondensi, koherensi, pragmatis, dan konsensus, serta menempatkan fakta, konsistensi argumentasi, manfaat sosial, dan dialog rasional sebagai kriteria validitas pengetahuan (Kearney, 1988; Littlejohn & Foss, 2008). Penelitian mengenai *post-truth* dan disinformasi lebih banyak mengkaji pola penyebaran berita palsu, faktor psikologis pengguna, arsitektur platform, serta penggunaan kecerdasan buatan untuk mendeteksi konten manipulatif (Aïmeur et al., 2023). Sementara itu, studi komunikasi Islam menekankan prinsip *al-haqq*, *ṣidq*, amanah, *tabayyun*, keadilan, dan kemaslahatan sebagai dasar normatif dalam menerima dan menyampaikan informasi (An-Naim, 2010; Hassan & Salleh, 2022). Meskipun memberikan kontribusi penting, ketiga kelompok kajian tersebut masih berjalan secara terpisah. Pendekatan filsafat cenderung menonjolkan rasionalitas dan validitas epistemik tanpa mengembangkan dimensi transendental secara memadai, sedangkan komunikasi Islam sering dibahas secara normatif tanpa dihubungkan secara sistematis dengan teori-teori kebenaran dan persoalan algoritmik dalam komunikasi digital.

Penelitian ini hadir untuk merespons keterpisahan tersebut dengan mengembangkan sintesis konseptual antara teori kebenaran dalam filsafat dan prinsip kebenaran dalam epistemologi Islam. Melalui pendekatan kualitatif dengan metode riset kepustakaan, penelitian ini menelaah dan membandingkan literatur tentang filsafat ilmu, teori komunikasi, epistemologi Islam, etika komunikasi, *post-truth*, disinformasi, algoritma media sosial, dan kecerdasan buatan generatif. Analisis isi dan analisis tematik digunakan untuk mengidentifikasi konsep, mengelompokkan dimensi kebenaran, menemukan persamaan dan perbedaan antarperspektif, serta merumuskan kerangka integratif yang relevan bagi komunikasi digital. Secara khusus, tulisan ini bertujuan: pertama, menjelaskan konsepsi kebenaran dalam ilmu komunikasi berdasarkan teori korespondensi, koherensi, pragmatis, dan konsensus; kedua, menganalisis kebenaran menurut Islam melalui konsep *al-haqq*, *ṣidq*, amanah, *tabayyun*, keadilan, dan tanggung jawab sosial; dan ketiga, merumuskan model epistemologis yang menghubungkan validitas faktual dan rasional dengan keterbukaan dialogis serta tanggung jawab etis-transendental. Dengan cara tersebut, penelitian ini tidak hanya memperluas kajian filsafat komunikasi, tetapi juga menempatkan epistemologi Islam sebagai sumber konseptual yang aktif dalam menjawab krisis kebenaran kontemporer.

Argumen utama penelitian ini adalah bahwa krisis kebenaran dalam komunikasi digital terjadi bukan semata-mata karena rendahnya akurasi informasi, melainkan karena ketidakseimbangan antara percepatan teknologi komunikasi dan tersedianya mekanisme epistemologis, dialogis, serta etis untuk menilai dan mempertanggungjawabkan pesan. Verifikasi faktual saja belum cukup ketika informasi yang benar dapat dibingkai secara manipulatif, digunakan untuk merugikan pihak lain, atau disebarkan dalam ruang algoritmik yang memperkuat bias dan polarisasi. Sebaliknya, pendekatan normatif juga



tidak memadai apabila tidak dilengkapi pengujian bukti, konsistensi logis, dan keterbukaan terhadap kritik. Atas dasar itu, penelitian ini mengajukan proposisi bahwa integrasi perspektif filsafat dan Islam akan menghasilkan konsep kebenaran komunikasi yang lebih komprehensif daripada penggunaan salah satu perspektif secara terpisah. Integrasi tersebut diperkirakan membentuk empat dimensi yang saling berhubungan, yaitu kebenaran faktual melalui korespondensi dan *tabayyun*, kebenaran rasional melalui koherensi dan penggunaan akal, kebenaran dialogis melalui konsensus dan *syura*, serta kebenaran etis-transendental melalui *sidq*, amanah, keadilan, dan kemaslahatan. Keempat dimensi tersebut menjadi dasar argumentatif untuk menilai kualitas komunikasi pada era *post-truth* dan kecerdasan buatan.

LANDASAN TEORI

Landasan mengenai kebenaran dalam ilmu komunikasi telah berkembang melalui tiga kecenderungan utama yang memperlihatkan hubungan antara validitas informasi, proses pembentukan makna, dan tanggung jawab komunikator. Kecenderungan pertama berangkat dari filsafat komunikasi dan epistemologi, dengan perhatian pada teori korespondensi, koherensi, pragmatis, dan konsensus untuk menjelaskan bagaimana suatu klaim komunikasi dapat diterima sebagai benar (Audi, 2010). Kecenderungan kedua berfokus pada krisis kebenaran dalam ekosistem digital, khususnya penyebaran misinformasi, disinformasi, *post-truth*, *echo chamber*, dan manipulasi berbasis kecerdasan buatan (Vosoughi et al., 2018). Kecenderungan ketiga membahas kebenaran dari perspektif komunikasi Islam melalui konsep *al-haqq*, *sidq*, amanah, *tabayyun*, keadilan, dan kemaslahatan (Hassan & Salleh, 2022). Ketiga pola tersebut menunjukkan bahwa penelitian terdahulu telah menjelaskan kebenaran sebagai persoalan faktual, rasional, sosial, dan moral, tetapi masih menempatkan setiap dimensi dalam tradisi kajian yang relatif terpisah. Pemetaan ini memperlihatkan luasnya perhatian akademik sekaligus belum terbangunnya satu kerangka konseptual yang menyatukan ketiga orientasi tersebut.

Kecenderungan pertama menempatkan kebenaran sebagai persoalan epistemologis yang menentukan sah atau tidaknya pengetahuan komunikasi. Penelitian dalam pola ini umumnya bersifat konseptual-filosofis dan menggunakan analisis argumentatif terhadap teori korespondensi, koherensi, pragmatis, serta konsensus. Teori korespondensi menilai kebenaran berdasarkan kesesuaian proposisi dengan realitas empiris; teori koherensi menekankan konsistensi logis antargagasan; teori pragmatis menghubungkan kebenaran dengan daya guna dan konsekuensi sosial; sedangkan teori konsensus menempatkan dialog rasional sebagai mekanisme pengujian klaim validitas (Biesta, 2010). Dalam ilmu komunikasi, orientasi tersebut digunakan untuk membaca objektivitas jurnalistik, pembentukan makna, argumentasi publik, dan legitimasi komunikasi demokratis (Craig,



1999). Kekuatan pola ini terletak pada kemampuannya menyediakan kriteria rasional bagi pengujian informasi. Namun, sebagian kajian filosofis cenderung berhenti pada validitas proposisional dan prosedur diskursus, sehingga belum sepenuhnya menjelaskan tanggung jawab moral-spiritual komunikator ketika informasi yang benar secara faktual digunakan secara manipulatif, diskriminatif, atau merusak kemaslahatan sosial. Akibatnya, persoalan mengenai tujuan, niat, dan pertanggungjawaban akhir komunikasi belum menjadi bagian utama dari analisis epistemologis tersebut.

Kecenderungan kedua berorientasi pada studi empiris dan komputasional mengenai gangguan informasi dalam media digital. Fokus utamanya meliputi pola penyebaran berita palsu, perilaku berbagi informasi, pengaruh emosi, desain algoritma, kredibilitas sumber, serta teknik deteksi otomatis. Vosoughi et al (2018), misalnya, menganalisis jutaan unggahan dan menunjukkan bahwa berita palsu dapat menyebar lebih jauh, cepat, dan luas daripada berita benar. Kajian berikutnya memperlihatkan bahwa kemarahan dan keterkejutan meningkatkan kemungkinan misinformasi dibagikan, sementara kelimpahan informasi dapat menurunkan ketelitian pengguna dalam memeriksa kebenaran (McLoughlin et al., 2024). Tinjauan Aïmeur et al (2023) memetakan pendekatan deteksi berbasis konten, sumber, jejaring, perilaku pengguna, dan kecerdasan buatan. Pola penelitian ini umumnya menggunakan eksperimen, analisis *big data*, survei, pemodelan jaringan, pembelajaran mesin, dan *systematic review*. Meskipun kuat dalam menjelaskan mekanisme penyebaran dan menawarkan solusi teknis, orientasi tersebut sering mereduksi kebenaran menjadi masalah akurasi, klasifikasi, dan intervensi platform, tanpa cukup membahas tujuan moral, niat komunikator, serta konsekuensi etis-transendental dari produksi dan penggunaan informasi.

Kecenderungan ketiga berkembang dalam kajian komunikasi Islam yang menempatkan kebenaran sebagai kesatuan antara validitas informasi dan pertanggungjawaban moral. Orientasi tematisnya berpusat pada *al-haqq* sebagai kebenaran yang bersumber dari Allah, *ṣidq* sebagai kejujuran, amanah sebagai tanggung jawab, *tabayyun* sebagai verifikasi, *‘adl* sebagai keadilan, dan *maslahah* sebagai orientasi kemanfaatan sosial Heer & Nasr (1993). Penelitian dalam pola ini umumnya menggunakan studi kepustakaan, tafsir tematik, analisis normatif, atau penelitian kualitatif terhadap praktik komunikasi Muslim. Prinsip *tabayyun*, khususnya, digunakan untuk menjelaskan kewajiban memeriksa sumber, bukti, konteks, dan kemungkinan dampak suatu berita sebelum diterima atau disebarkan (Tanjung et al., 2023). Kajian tersebut memperluas ukuran kebenaran karena tidak hanya mempertanyakan apakah pesan sesuai dengan fakta, tetapi juga apakah pesan disampaikan secara jujur, adil, dan bertanggung jawab. Namun, banyak penelitian komunikasi Islam masih bersifat preskriptif-normatif, berfokus pada penjelasan ayat atau prinsip etis, dan belum menghubungkannya secara sistematis dengan



teori kebenaran modern, arsitektur algoritmik, *deepfake*, serta perubahan otoritas pengetahuan akibat kecerdasan buatan generatif.

Evaluasi terhadap ketiga kecenderungan tersebut memperlihatkan adanya celah konseptual yang belum memperoleh perhatian memadai. Kajian filsafat komunikasi telah merumuskan ukuran faktual, logis, pragmatis, dan dialogis, tetapi relatif kurang memperhatikan sumber nilai transendental dan pertanggungjawaban moral komunikasi. Studi disinformasi digital berhasil mengidentifikasi pola penyebaran, faktor psikologis, serta solusi deteksi, tetapi cenderung memperlakukan kebenaran sebagai persoalan teknis yang dapat diselesaikan melalui literasi, pemeriksaan fakta, moderasi konten, atau klasifikasi algoritmik (UNESCO, 2024). Sebaliknya, kajian komunikasi Islam telah menegaskan kejujuran, amanah, *tabayyun*, dan keadilan, tetapi sering belum memasukkan pengujian korespondensial, koherensi argumentasi, deliberasi publik, dan struktur kuasa platform ke dalam satu model analitis. Dengan demikian, studi terdahulu cenderung “melupakan” hubungan sistematis antara cara mengetahui kebenaran, cara menguji kebenaran, cara mendialogkan kebenaran, dan tujuan etis penggunaan kebenaran. Kebaruan penelitian ini terletak pada upaya menjembatani keempat ranah tersebut sehingga kebenaran komunikasi dipahami sebagai konstruksi epistemologis sekaligus komitmen etis-transendental. Kesenjangan tersebut penting karena teknologi yang efektif mendeteksi ketidakakuratan belum tentu dapat menentukan keadilan dan kemaslahatan penggunaan suatu informasi.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini menawarkan arah baru berupa integrasi filsafat komunikasi dan epistemologi Islam untuk membangun model kebenaran yang relevan dengan era digital. Fokus penelitian tidak diarahkan pada perbandingan dua tradisi secara deskriptif, melainkan pada sintesis konseptual yang mempertemukan teori korespondensi dengan *tabayyun*, teori koherensi dengan penggunaan akal, teori konsensus dengan *syura*, serta pragmatisme sosial dengan amanah, keadilan, dan kemaslahatan. Sintesis ini menghasilkan empat orientasi analitis, yaitu kebenaran faktual, kebenaran rasional, kebenaran dialogis, dan kebenaran etis-transendental. Kebenaran faktual menguji kesesuaian pesan dengan bukti; kebenaran rasional menilai konsistensi argumen; kebenaran dialogis menguji keterbukaan klaim terhadap kritik; sedangkan kebenaran etis-transendental menilai niat, cara, dan dampak sosial penggunaan informasi. Arah tersebut relevan karena tata kelola platform dan penggunaan kecerdasan buatan membutuhkan pendekatan yang melampaui solusi teknis serta memperhatikan kebebasan berekspresi, akses terhadap informasi, akuntabilitas, dan martabat manusia (UNESCO, 2024). Dengan demikian, penelitian ini memperluas filsafat komunikasi melalui kerangka multidimensional yang menghubungkan validitas ilmiah dengan tanggung jawab moral dan spiritual.



METODE PENELITIAN

Unit analisis penelitian ini adalah artefak tekstual dan konseptual yang membahas kebenaran dalam ilmu komunikasi dari perspektif filsafat, Islam, dan komunikasi digital. Artefak tersebut mencakup proposisi teoretis, definisi, argumentasi, prinsip normatif, hasil penelitian, serta model konseptual yang terdapat dalam buku, artikel jurnal, dokumen kebijakan, dan sumber keislaman. Dengan demikian, penelitian tidak menempatkan individu, organisasi, atau komunitas sebagai unit analisis langsung, melainkan teks sebagai representasi pengetahuan yang diproduksi dan diperdebatkan dalam komunitas akademik. Analisis difokuskan pada empat kategori konseptual, yaitu kriteria kebenaran faktual, rasional, dialogis, dan etis-transendental. Setiap teks dibaca untuk menemukan bagaimana kebenaran didefinisikan, sumber pengetahuan yang digunakan, prosedur pengujian klaim, posisi komunikator dan penerima pesan, serta implikasi sosial-moral yang ditimbulkan. Penetapan dokumen sebagai unit analisis sejalan dengan pandangan Bowen (2009) bahwa dokumen dapat digunakan secara sistematis untuk menghasilkan pemahaman, makna, dan pengetahuan empiris-kontekstual. Fokus tersebut memungkinkan penelitian membandingkan struktur gagasan lintas disiplin tanpa melepaskan setiap konsep dari konteks filosofis, komunikatif, dan keislamannya.

Penelitian ini menggunakan desain kualitatif dengan jenis riset kepustakaan integratif dan orientasi interpretatif-kritis. Desain kualitatif dipilih karena tujuan penelitian bukan menghitung frekuensi konsep atau menguji hubungan statistik, melainkan memahami, membandingkan, dan menyintesis makna kebenaran yang berkembang dalam tradisi filsafat komunikasi dan epistemologi Islam. Riset kepustakaan diperlakukan sebagai metodologi penelitian, bukan sekadar rangkuman bacaan, sehingga proses penelusuran, seleksi, evaluasi, pengodean, dan sintesis dilakukan secara terstruktur (Snyder, 2019). Karakter integratif memungkinkan penelitian menggabungkan sumber teoretis, normatif, dan empiris untuk menghasilkan konseptualisasi baru, sebagaimana dikembangkan dalam pendekatan *integrative review* (Whittemore & Knafl, 2005). Orientasi interpretatif digunakan untuk memahami konteks dan makna setiap konsep, sedangkan orientasi kritis digunakan untuk menilai asumsi, keterbatasan, relasi kekuasaan, dan konsekuensi etis yang tersembunyi dalam teori maupun praktik komunikasi digital. Desain ini tidak diarahkan sebagai meta analisis atau *systematic review* kuantitatif, melainkan sebagai sintesis konseptual transparan yang menghasilkan model integratif kebenaran komunikasi. Pilihan desain tersebut memberikan ruang bagi dialog antara sumber ilmiah, filosofis, normatif, dan empiris yang memiliki karakter serta standar argumentasi berbeda.

Sumber data penelitian berupa data sekunder berbentuk teks yang berasal dari sumber primer dan sumber pendukung. Sumber primer mencakup Al-Qur'an, karya utama



tentang epistemologi dan filsafat Islam, buku teori kebenaran, filsafat komunikasi, teori komunikasi, serta artikel penelitian yang membahas disinformasi, *post-truth*, algoritma media sosial, dan kecerdasan buatan. Sumber pendukung meliputi artikel tinjauan, laporan lembaga internasional, dokumen kebijakan digital, dan penelitian komunikasi Islam yang relevan. Penelusuran dilakukan melalui Scopus, ScienceDirect, Google Scholar, Crossref, dan laman resmi lembaga seperti UNESCO dengan kombinasi kata kunci "*truth in communication*", "*communication epistemology*", "*post-truth*", "*misinformation*", "*disinformation*", "*Islamic communication ethics*", "*tabayyun*", "*al-haqq*", dan "*generative artificial intelligence*". Literatur mutakhir diprioritaskan pada publikasi 2018–2026 untuk menangkap perkembangan komunikasi digital, sedangkan sumber klasik tetap digunakan apabila bersifat fondasional. Kriteria inklusi meliputi relevansi langsung, kredibilitas penerbit, kejelasan argumentasi atau metode, dan ketersediaan teks yang dapat dianalisis. Sumber populer tanpa otoritas akademik, publikasi duplikat, dan tulisan yang tidak berkaitan langsung dengan pertanyaan penelitian dikeluarkan dari korpus analisis.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dalam lima tahap. Tahap pertama adalah perumusan fokus dan kata kunci berdasarkan tiga domain utama, yaitu teori kebenaran, komunikasi digital, dan epistemologi komunikasi Islam. Tahap kedua berupa identifikasi sumber melalui pencarian pada basis data akademik, katalog buku, penelusuran daftar pustaka, dan *citation chaining* untuk menemukan karya fondasional maupun penelitian terbaru. Tahap ketiga adalah penyaringan judul, abstrak, kata kunci, dan identitas penerbit untuk menghapus duplikasi serta sumber yang tidak relevan. Tahap keempat ialah pemeriksaan kelayakan teks penuh berdasarkan kesesuaian dengan pertanyaan penelitian, kekuatan argumentasi, transparansi metode, dan kontribusi terhadap salah satu dimensi kebenaran. Tahap kelima adalah pencatatan data dalam matriks dokumentasi yang memuat identitas sumber, tujuan, pendekatan, konsep utama, temuan, keterbatasan, dan relevansinya bagi sintesis. Prosedur identifikasi, penyaringan, kelayakan, dan inklusi mengadaptasi prinsip transparansi PRISMA 2020, tanpa mengklaim penelitian ini sebagai *systematic review* mengenai efek intervensi (Page et al., 2021). Dokumentasi proses juga digunakan sebagai *audit trail* untuk menjaga keterlacakan keputusan penelitian.

Analisis data menggunakan kombinasi *content analysis* dan analisis tematik. Tahap pertama dilakukan dengan membaca seluruh sumber secara berulang untuk memahami konteks, posisi epistemologis, dan istilah utama. Tahap kedua adalah unitisasi data dengan menandai kalimat, proposisi, atau bagian teks yang menjelaskan sumber kebenaran, kriteria validitas, mekanisme verifikasi, proses dialog, nilai moral, dan dampak komunikasi. Tahap ketiga berupa pengodean awal secara deduktif berdasarkan teori korespondensi, koherensi, pragmatis, konsensus, *al-haqq*, *sidq*, amanah, *tabayyun*, keadilan, dan kemaslahatan, disertai



pengodean induktif terhadap tema baru yang muncul. Tahap keempat mengelompokkan kode menjadi tema faktual, rasional, dialogis, dan etis-transendental, kemudian membandingkan persamaan, perbedaan, ketegangan, serta hubungan antartema. Tahap kelima adalah sintesis interpretatif untuk merumuskan model integratif dan proposisi teoretis penelitian. *Content analysis* digunakan untuk menarik inferensi secara sistematis dari teks (Krippendorff, 2022), sedangkan analisis tematik mengikuti proses familiarisasi, pengodean, pengembangan, peninjauan, penamaan, dan penulisan tema (Braun & Clarke, 2019). Keabsahan diperkuat melalui triangulasi sumber, perbandingan lintas disiplin, pemeriksaan konsistensi interpretasi, dan *audit trail*.

RESULT AND DISCUSSION

Result

Transformasi dan Kedaruratan Kebenaran dalam Komunikasi Digital

Hasil pertama menunjukkan adanya kontroversi dan keadaan darurat epistemik dalam komunikasi digital, yaitu meningkatnya ketegangan antara kecepatan sirkulasi pesan dan kemampuan masyarakat memverifikasi kebenarannya. Data tekstual diperoleh dari artikel mengenai *post-truth*, misinformasi, disinformasi, algoritma platform, dan kecerdasan buatan generatif. Literatur memperlihatkan bahwa informasi palsu memperoleh keuntungan distribusional karena unsur kebaruan, emosi, identitas kelompok, dan desain keterlibatan platform (Vosoughi et al., 2018). McLoughlin et al (2024) secara khusus menemukan bahwa kemarahan lebih banyak muncul sebagai reaksi terhadap sumber misinformasi dan berkaitan dengan peningkatan pembagian pesan, bahkan ketika pengguna tidak membaca isinya secara mendalam. Penelitian eksperimen mengenai *deepfake* juga menunjukkan bahwa kemampuan manusia membedakan pidato politik asli dan hasil fabrikasi dipengaruhi oleh kualitas manipulasi, modalitas pesan, perhatian, dan karakteristik penerima (Groh et al., 2024). Data tersebut menegaskan bahwa krisis kebenaran bukan hanya disebabkan keberadaan informasi yang salah, tetapi juga oleh ekosistem komunikasi yang memberikan insentif kepada pesan emosional, cepat, berulang, dan menyerupai realitas.

Visualisasi data pada Tabel 1 merangkum hubungan antara bentuk gangguan informasi, mekanisme penyebaran, dan konsekuensi yang ditimbulkannya dalam komunikasi digital. Misinformasi ditandai oleh ketidakakuratan yang dapat beredar tanpa niat menipu, sedangkan disinformasi melibatkan produksi atau distribusi pesan menyesatkan secara sengaja (Wardle & Hossein, 2017). *Post-truth* menunjukkan pergeseran ukuran penerimaan pesan dari fakta objektif menuju emosi, keyakinan pribadi, dan identitas kelompok (McIntyre, 2018). *Echo chamber* dan *filter bubble* mempersempit keragaman sumber yang diterima pengguna sehingga klaim yang terus diulang tampak



koheren meskipun tidak sesuai dengan bukti. *Deepfake* dan konten generatif menambah persoalan karena manipulasi tidak lagi terbatas pada bahasa, tetapi mencakup wajah, suara, gerak, dan situasi yang tampak autentik. Dengan kata lain, data menunjukkan perubahan dari pemalsuan informasi sederhana menuju rekayasa lingkungan persepsi. Persoalan kebenaran kemudian tidak cukup diatasi melalui koreksi isi karena struktur distribusi, emosi pengguna, kredibilitas visual, dan kuasa algoritmik ikut menentukan apakah suatu klaim dipercaya dan disebar. Hal tersebut juga memperlihatkan bahwa setiap gangguan membutuhkan prosedur pemeriksaan yang berbeda dan saling melengkapi.

Tabel 1. Bentuk, Mekanisme, dan Konsekuensi Krisis Kebenaran dalam Komunikasi Digital

Fenomena	Data tekstual yang ditemukan	Kategori CCTES	Konsekuensi komunikasi
Misinformasi	Informasi tidak akurat beredar tanpa verifikasi memadai	Emergency	Kesalahan pemahaman dan keputusan
Disinformasi	Informasi menyesatkan diproduksi atau disebar dengan sengaja	Controversy/Emergency	Manipulasi opini dan hilangnya kepercayaan
<i>Post-truth</i>	Emosi dan identitas lebih dominan daripada bukti	Change/Trend	Polarisasi dan relativisasi kebenaran
<i>Echo chamber</i>	Pengguna menerima informasi yang menguatkan keyakinannya	Trend	Penguatan bias dan tertutupnya dialog
<i>Deepfake</i> dan AI generatif	Audio visual sintetis menyerupai peristiwa nyata	Transformation/Emergency	Kaburnya batas antara fakta dan rekayasa
Tata kelola platform	Distribusi dipengaruhi	Controversy	Popularitas dianggap sebagai validitas



	algoritma dan ekonomi perhatian		
--	---------------------------------	--	--

Sumber: Hasil analisis dan sintesis literatur oleh peneliti, 2026

Pembacaan ulang terhadap bukti pertama menghasilkan empat pola. Pertama, terdapat pola akselerasi, yaitu informasi bergerak lebih cepat daripada proses pemeriksaan sumber dan konteks. Kedua, muncul pola afektif ketika kemarahan, ketakutan, keterkejutan, atau loyalitas kelompok menjadi pemicu penerimaan dan pembagian pesan. Ketiga, terdapat pola penguatan algoritmik karena platform memprioritaskan konten yang menghasilkan keterlibatan sehingga popularitas dapat disalahartikan sebagai kebenaran. Keempat, berkembang pola realisme sintetis, yakni kemampuan kecerdasan buatan menghasilkan teks, gambar, suara, dan video yang meyakinkan, tetapi tidak selalu memiliki rujukan faktual. Keempat kecenderungan tersebut saling memperkuat realisme sintetis menyediakan konten, emosi mempercepat respons, algoritma memperluas jangkauan, dan lemahnya verifikasi mempertahankan kesalahan. Bahkan, Clark & Lewandowsky (2026) menunjukkan bahwa isi *deepfake* masih dapat memengaruhi penilaian sebagian penerima meskipun mereka telah diperingatkan bahwa video tersebut palsu. UNESCO (2024) karena itu menempatkan penanganan disinformasi dalam kerangka transparansi, akuntabilitas, hak asasi manusia, dan keterlibatan multipihak. Temuan ini menyatakan ulang krisis kebenaran sebagai masalah sistemik yang mencakup isi pesan, perilaku pengguna, teknologi produksi, dan struktur institusional komunikasi.

Konvergensi dan Kontroversi Konsep Kebenaran Perspektif Filsafat dan Islam

Hasil kedua memperlihatkan adanya transformasi konseptual dalam cara kebenaran komunikasi dipahami. Data dari literatur filsafat menunjukkan empat ukuran utama, yaitu kesesuaian klaim dengan realitas dalam teori korespondensi, konsistensi antargagasan dalam teori koherensi, kebermanfaatan konsekuensi dalam pragmatisme, dan penerimaan melalui diskursus rasional dalam teori konsensus (Audi, 2010). Sementara itu, teks epistemologi dan komunikasi Islam menempatkan *al-haqq* sebagai orientasi kebenaran serta mengoperasionalkannya melalui *ṣidq*, amanah, *tabayyun*, keadilan, *syura*, dan kemaslahatan (Parhan, 2022). Perbandingan kedua kelompok data memperlihatkan bahwa filsafat menyediakan instrumen analitis untuk menguji fakta, logika, manfaat, dan legitimasi diskursif, sedangkan Islam menambahkan orientasi wahyu, integritas komunikator, tanggung jawab, serta akibat moral pesan. Bukti ini menunjukkan bahwa kedua perspektif tidak berada dalam hubungan saling meniadakan. Keduanya mengamati objek yang sama dari tingkat berbeda yaitu filsafat terutama menjelaskan validitas klaim, sementara Islam memperluasnya kepada kelayakan niat, cara, tujuan, dan dampak komunikasi. Sintesis



tersebut memberikan dasar untuk menghubungkan pengetahuan ilmiah dengan pembentukan tanggung jawab komunikasi.

Tabel 2 menyajikan hubungan dan titik integrasi antara konsep kebenaran dalam perspektif filsafat dan Islam yang ditemukan dalam literatur. Teori korespondensi beririsan dengan *tabayyun* karena keduanya mewajibkan pemeriksaan hubungan antara klaim, sumber, bukti, dan realitas. Teori koherensi bertemu dengan penggunaan akal secara kritis karena informasi harus konsisten, dapat dijelaskan, dan tidak bertentangan dengan pengetahuan yang sah. Teori konsensus berhubungan dengan *syura* melalui penekanan pada keterbukaan partisipasi, pengujian argumentasi, serta penolakan terhadap dominasi sepihak. Adapun pragmatisme memiliki titik temu dengan kemaslahatan dalam perhatian terhadap akibat praktis pesan, walaupun kemaslahatan memberi batas moral yang lebih tegas daripada ukuran keberhasilan fungsional semata. Prinsip *ṣidq*, amanah, dan keadilan tidak memiliki padanan penuh dalam teori kebenaran modern karena ketiganya menilai integritas pelaku serta pertanggungjawaban penggunaan informasi. Penyajian pada Tabel 2 menunjukkan bahwa kebenaran komunikasi dapat dinilai melalui beberapa pertanyaan bertingkat mengenai validitas bukti, rasionalitas argumentasi, dan tanggung jawab etis dalam penyampaian informasi. Apakah pesannya sesuai bukti, apakah argumentasinya dapat dipertanggungjawabkan, serta apakah penyampiannya dilakukan secara jujur dan adil. Hubungan ini menjadi dasar pembentukan model integratif. Urutan pertanyaan tersebut memudahkan pembaca membedakan validitas informasi dari kepantasan penggunaannya.

Tabel 2. Integrasi Konsep Kebenaran dalam Perspektif Filsafat dan Islam

Perspektif filsafat	Perspektif Islam	Titik integrasi	Indikator
Korespondensi	<i>Tabayyun</i>	Pemeriksaan fakta dan sumber	Akurasi, bukti, autentisitas
Koherensi	Akal dan <i>tafakkur</i>	Konsistensi serta kelayakan argumentasi	Logis, kontekstual, tidak kontradiktif
Konsensus	<i>Syura</i>	Pengujian kebenaran melalui dialog	Partisipasi, kesetaraan, keterbukaan
Pragmatisme	Kemaslahatan	Penilaian akibat praktis komunikasi	Manfaat, pencegahan kerusakan



Ketulusan komunikatif	Šidq dan amanah	Integritas komunikator	Kejujuran niat dan penyampaian
Keadilan diskursif	'Adl	Keseimbangan representasi	Tidak diskriminatif dan tidak manipulatif

Sumber: Hasil analisis dan sintesis literatur oleh peneliti, 2026

Deskripsi terhadap bukti kedua menghasilkan empat kecenderungan. Pertama, terdapat konvergensi epistemik antara korespondensi dan *tabayyun* dalam penegasan bahwa klaim tidak boleh diterima tanpa bukti. Kedua, terdapat konvergensi rasional-dialogis antara koherensi, konsensus, penggunaan akal, dan *syura*, yang menempatkan kritik serta musyawarah sebagai mekanisme koreksi. Ketiga, ditemukan perluasan aksiologis karena *šidq*, amanah, keadilan, dan kemaslahatan mengubah kebenaran dari sekadar sifat proposisi menjadi kewajiban moral komunikator. Keempat, muncul ketegangan antara manfaat pragmatis dan batas etis yaitu pesan yang efektif memengaruhi khalayak belum tentu benar atau bermaslahat. Temuan ini menolak penyamaan keberhasilan komunikasi dengan kebenaran komunikasi. Dalam lingkungan digital, suatu pesan dapat memperoleh jutaan interaksi dan tetap tidak akurat, manipulatif, atau tidak adil. Oleh karena itu, kebenaran memerlukan validasi berlapis yang menilai realitas, nalar, proses diskursus, dan konsekuensi. Pendekatan berlapis tersebut sekaligus menjelaskan kekurangan solusi yang hanya mengandalkan pemeriksaan fakta atau moderasi otomatis tanpa memperhatikan integritas manusia dan keadilan institusional. Temuan ini memperkuat kebutuhan akan kerangka yang tidak memisahkan epistemologi dari etika komunikasi.

Model Integratif sebagai Solusi Kebenaran Komunikasi

Hasil ketiga berupa solusi konseptual terhadap kontroversi dan keadaan darurat kebenaran digital, yakni model integratif kebenaran komunikasi. Model ini diperoleh melalui sintesis tema dan hubungan konsep yang berulang dalam literatur. Empat dimensi ditemukan, yaitu kebenaran faktual, rasional, dialogis, dan etis-transendental. Kebenaran faktual menuntut kesesuaian pesan dengan bukti yang dapat diverifikasi; kebenaran rasional menuntut konsistensi, kecukupan alasan, dan keterbukaan terhadap koreksi; kebenaran dialogis menuntut proses pertukaran argumen yang setara serta bebas manipulasi; sedangkan kebenaran etis-transendental menuntut *šidq*, amanah, keadilan, dan orientasi kemaslahatan. Model tersebut tidak menempatkan keempat dimensi sebagai pilihan alternatif, melainkan sebagai lapisan pengujian yang harus digunakan secara bersama. Informasi yang akurat tetapi dikeluarkan dari konteks dapat gagal pada dimensi rasional; informasi yang benar dan logis tetapi dibungkam dari kritik dapat gagal secara dialogis; sementara informasi yang memenuhi tiga dimensi awal tetapi dipakai untuk



mempermalukan atau menindas pihak lain dapat gagal secara etis. Sintesis ini memperlihatkan bahwa kualitas komunikasi ditentukan oleh keseluruhan proses, bukan hanya isi proposisinya.

Tabel 3 menyajikan operasionalisasi model integratif melalui empat komponen, yaitu dimensi kebenaran, pertanyaan utama, prosedur pengujian, dan risiko apabila suatu dimensi diabaikan. Pada dimensi faktual, pertanyaan utamanya adalah “apakah klaim sesuai dengan bukti?”, dengan prosedur verifikasi sumber, triangulasi data, pemeriksaan tanggal, dan autentikasi media. Pada dimensi rasional, pertanyaannya adalah “apakah klaim konsisten dan beralasan?”, yang diuji melalui analisis konteks, logika, keterhubungan bukti, serta identifikasi kesalahan berpikir. Pada dimensi dialogis, pertanyaannya adalah “apakah klaim terbuka terhadap kritik yang setara?”, dengan indikator akses terhadap informasi, keberagaman suara, transparansi koreksi, dan ketiadaan manipulasi. Pada dimensi etis-transendental, pertanyaannya adalah “apakah komunikasi dilakukan secara jujur, adil, amanah, dan bermaslahat?”, yang dinilai melalui niat, cara penyampaian, perlindungan martabat, serta akibat sosial. Penyajian pada Tabel 3 menegaskan bahwa pengujian kebenaran digital perlu bergerak dari pemeriksaan isi informasi menuju evaluasi terhadap proses penyampaian, keterbukaan dialog, dan tujuan penggunaan informasi. Pedoman UNESCO mengenai tata kelola platform juga menekankan transparansi, uji tuntas hak asasi manusia, akuntabilitas, akses informasi, dan pengawasan independen yang konsisten dengan struktur multidimensional tersebut. Keempat komponen membuat model dapat diterjemahkan menjadi instrumen pemeriksaan yang operasional.

Tabel 3. Operasionalisasi Model Integratif Kebenaran dalam Ilmu Komunikasi

Dimensi	Pertanyaan utama	Prosedur pengujian	Risiko jika diabaikan
Faktual	Apakah informasi sesuai dengan bukti?	Verifikasi sumber, triangulasi, autentikasi	Misinformasi dan disinformasi
Rasional	Apakah argumentasi logis dan kontekstual?	Analisis logika, konteks, dan hubungan bukti	Manipulasi konteks dan sesat pikir
Dialogis	Apakah klaim terbuka terhadap kritik?	Dialog setara, koreksi, keberagaman sumber	Dominasi dan pembungkaman



Etis-transendental	Apakah komunikasi jujur, adil, dan bermaslahat?	Evaluasi niat, cara, dampak, dan tanggung jawab	Fitnah, diskriminasi, serta kerusakan sosial
---------------------------	---	---	--

Sumber: Hasil analisis dan sintesis literatur oleh peneliti, 2026

Deskripsi akhir menemukan empat karakter model integratif. Pertama, model bersifat sekuensial karena pemeriksaan dapat dimulai dari bukti, bergerak ke penalaran, dilanjutkan dengan pengujian publik, dan diakhiri dengan pertimbangan etis. Kedua, model bersifat komplementer karena kegagalan satu dimensi tidak dapat ditutupi oleh keberhasilan dimensi lain; popularitas tidak menggantikan fakta dan niat baik tidak menggantikan bukti. Ketiga, model bersifat multilevel karena dapat digunakan oleh individu, jurnalis, lembaga pendidikan, organisasi media, pengembang kecerdasan buatan, dan regulator platform. Keempat, model bersifat preventif sekaligus korektif yaitu prinsip *tabayyun* dan autentikasi mencegah penyebaran kesalahan, sedangkan dialog, transparansi, dan amanah mengarahkan koreksi serta pemulihan kepercayaan. Berdasarkan pola tersebut, solusi krisis kebenaran tidak dapat dibebankan hanya kepada literasi individu. Intervensi perlu menyentuh desain teknologi, kebijakan institusi, standar profesi, dan pendidikan moral. Model ini dengan demikian mengubah kebenaran dari konsep abstrak menjadi kerangka evaluatif yang dapat mengarahkan produksi, distribusi, penerimaan, dan koreksi informasi dalam ekosistem komunikasi digital. Karakter tersebut memperkuat kelayakan model untuk diterapkan dalam berbagai konteks sosial dan kelembagaan.

Discussion

Penelitian ini menelaah bagaimana kebenaran ilmu komunikasi dapat dibangun ketika ekosistem digital mempercepat penyebaran misinformasi, memperkuat bias algoritmik, dan memungkinkan penciptaan realitas sintesis. Hasil penelitian menghasilkan tiga temuan utama. Pertama, krisis kebenaran digital bersifat sistemik karena dibentuk oleh interaksi antara karakter pesan, emosi pengguna, teknologi generatif, dan struktur distribusi platform. Kedua, filsafat dan Islam menyediakan perangkat yang berbeda tetapi saling melengkapi seperti teori korespondensi, koherensi, pragmatis, dan konsensus memberi ukuran faktual, rasional, fungsional, serta dialogis, sedangkan *al-haqq*, *sidq*, amanah, *tabayyun*, *syura*, keadilan, dan kemaslahatan memperluas ukuran tersebut ke wilayah moral-transendental. Ketiga, sintesis kedua tradisi menghasilkan model empat dimensi yang terdiri atas kebenaran faktual, rasional, dialogis, dan etis-transendental. Ringkasan ini menunjukkan bahwa penelitian tidak hanya mengidentifikasi gangguan informasi, tetapi juga merumuskan kerangka penilaian yang menyeluruh. Model tersebut menempatkan kebenaran sebagai kualitas yang melekat pada bukti, argumentasi, proses



komunikasi, integritas pelaku, serta dampak sosial pesan secara bersamaan. Kerangka ini sekaligus menjadi dasar untuk membaca persoalan kebenaran secara lebih utuh.

Hubungan antartemuan dapat dijelaskan melalui ketidakseimbangan antara kapasitas produksi informasi dan kapasitas sosial untuk memeriksanya. Teknologi digital menurunkan biaya produksi serta distribusi pesan, sedangkan algoritma keterlibatan meningkatkan peluang konten emosional memperoleh perhatian. Kondisi tersebut menjelaskan mengapa informasi yang tidak akurat dapat menjadi dominan walaupun tersedia mekanisme pemeriksaan fakta. McLoughlin et al (2024) menunjukkan bahwa kemarahan mendorong penyebaran misinformasi, sedangkan eksperimen Groh et al (2024) memperlihatkan bahwa manusia tidak selalu mampu mengenali *deepfake* politik secara konsisten. Clark & Lewandowsky (2026) bahkan menemukan bahwa peringatan transparansi belum sepenuhnya menghilangkan pengaruh isi video palsu terhadap penilaian penerima. Karena itu, krisis kebenaran muncul ketika kecepatan, emosi, dan kemiripan visual mendahului refleksi rasional. Integrasi filsafat dan Islam diperlukan sebab setiap perspektif mengoreksi titik lemah perspektif lain. Pengujian faktual mencegah klaim normatif menjadi dogmatis, sedangkan amanah dan keadilan mencegah fakta dipakai secara manipulatif. Penjelasan tersebut menegaskan bahwa hubungan antardimensi bersifat kausal, korektif, dan saling membatasi.

Temuan penelitian sejalan dengan Vosoughi et al (2018), Scott & Rozin (2020), serta Aïmeur et al (2023), yang memandang misinformasi sebagai fenomena kompleks yang dipengaruhi isi, pengguna, jaringan, dan teknologi. Kesamaan lainnya tampak pada penekanan UNESCO (2024) bahwa tata kelola platform tidak cukup mengandalkan penghapusan konten, tetapi membutuhkan transparansi, akuntabilitas, perlindungan hak, dan partisipasi multipihak. Namun, penelitian ini berbeda dari kajian deteksi misinformasi yang terutama mengukur akurasi klasifikasi atau efektivitas intervensi teknis. Penelitian ini juga melampaui kajian komunikasi Islam yang hanya menjadikan *tabayyun* sebagai anjuran verifikasi individual. Kebaruannya terletak pada pengintegrasian empat tingkat kebenaran dan pada penempatan *sidq*, amanah, keadilan, serta kemaslahatan sebagai bagian dari epistemologi komunikasi, bukan sekadar tambahan etika setelah kebenaran faktual ditentukan. Selain itu, penelitian ini menghubungkan konsensus dengan *syura* dan pragmatisme dengan kemaslahatan, sambil menunjukkan batas keduanya. Sintesis tersebut menghasilkan model yang dapat membaca ketidakakuratan, manipulasi konteks, eksklusi dialogis, dan kerusakan moral dalam satu kerangka analisis.

Makna hasil penelitian harus dipahami dalam konteks sosial dan historis perubahan otoritas pengetahuan. Pada era media konvensional, institusi jurnalistik, akademik, dan negara memiliki peran dominan dalam menentukan informasi yang layak beredar. Media berjejaring kemudian memindahkan sebagian otoritas tersebut kepada platform, pembuat



konten, komunitas daring, serta sistem rekomendasi otomatis. Perubahan ini memperluas partisipasi, tetapi juga mengaburkan siapa yang bertanggung jawab ketika pesan menyesatkan diproduksi, diperkuat, atau dimonetisasi. Secara ideologis, logika ekonomi perhatian menjadikan keterlibatan pengguna sebagai ukuran keberhasilan sehingga pesan provokatif dapat lebih bernilai daripada pesan yang akurat. Model integratif memberi makna bahwa kebenaran merupakan praktik sosial yang memerlukan institusi adil, bukan hanya kecakapan individual. Perspektif Islam menambahkan bahwa kebebasan komunikasi harus disertai amanah dan pertanggungjawaban, sedangkan filsafat kritis mengingatkan bahwa konsensus dapat cacat apabila ruang dialog dikuasai kepentingan tertentu. Karena itu, kebenaran digital harus dibaca sebagai perjuangan menjaga hubungan antara pengetahuan, kekuasaan, moralitas, dan kemaslahatan di tengah transformasi teknologi. Penafsiran ini memperlihatkan bahwa persoalan epistemik selalu berhubungan dengan struktur sosial yang lebih luas.

Secara reflektif, model empat dimensi memiliki fungsi sekaligus potensi disfungsi. Fungsinya adalah memperluas pemeriksaan informasi seperti pengguna tidak berhenti pada pertanyaan benar atau salah, tetapi memeriksa konsistensi, keterbukaan, keadilan, dan dampaknya. Bagi jurnalisme, model ini memperkuat verifikasi serta akuntabilitas koreksi; bagi pendidikan, model menyediakan kerangka literasi digital yang menghubungkan berpikir kritis dengan pembentukan karakter; bagi platform, model mendorong transparansi algoritma dan perlindungan hak pengguna. Namun, penerapan yang tidak hati-hati dapat menimbulkan disfungsi. Istilah moral atau kemaslahatan dapat dipakai untuk membenarkan sensor, membungkam kritik, atau memaksakan tafsir kelompok dominan. Demikian pula, konsensus tidak selalu identik dengan kebenaran apabila partisipasi tidak setara, sedangkan pemeriksaan fakta dapat kehilangan kepercayaan apabila lembaga pemeriksa tidak transparan. UNESCO menegaskan bahwa penanganan disinformasi harus tetap melindungi kebebasan berekspresi dan akses terhadap informasi. Oleh sebab itu, dimensi etis-transendental harus diterapkan bersama bukti, rasionalitas, dialog, prosedur keberatan, dan pengawasan independen agar tidak berubah menjadi instrumen kontrol. Refleksi tersebut menuntut penggunaan model secara terbuka, proporsional, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Implikasi praktis penelitian ini adalah perlunya rencana aksi berlapis. Pada tingkat individu dan pendidikan, kurikulum literasi digital perlu menggabungkan verifikasi sumber, pembacaan konteks, pengenalan manipulasi kecerdasan buatan, logika argumentasi, adab dialog, serta etika berbagi informasi. Pada tingkat organisasi media, redaksi perlu menerapkan protokol autentikasi konten, transparansi sumber, pelabelan koreksi, dan penilaian dampak sebelum publikasi. Pada tingkat platform, pengembang perlu menyediakan penjelasan sistem rekomendasi, pelacakan asal-usul media, kanal



banding, akses data bagi peneliti, serta audit risiko hak asasi manusia sebagaimana ditekankan UNESCO (2024). Pada tingkat pemerintah dan lembaga keagamaan, kebijakan hendaknya mendorong kolaborasi dengan akademisi, pemeriksa fakta, masyarakat sipil, dan komunitas agama tanpa menjadikan penanggulangan disinformasi sebagai alasan pembatasan yang tidak proporsional. Penelitian lanjutan perlu menguji model empat dimensi melalui studi kasus, survei, eksperimen, atau metode campuran pada jurnalis, mahasiswa, pengguna media sosial, dan pengembang teknologi. Langkah tersebut akan mengubah model konseptual menjadi instrumen evaluasi dan pedoman kebijakan yang terukur. Evaluasi berkala diperlukan agar penerapannya tetap adaptif terhadap perubahan teknologi dan risiko sosial.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, kesimpulan terpenting penelitian ini menunjukkan bahwa kebenaran dalam ilmu komunikasi tidak dapat dinilai hanya berdasarkan kesesuaian informasi dengan fakta, tetapi harus dipahami sebagai kesatuan antara bukti, rasionalitas, proses dialog, dan tanggung jawab etis. Pelajaran utama yang dapat diambil ialah bahwa krisis kebenaran pada era digital bukan semata-mata disebabkan oleh keberadaan informasi palsu, melainkan juga oleh lemahnya mekanisme verifikasi, dominasi emosi, penguatan algoritmik, tertutupnya ruang dialog, serta hilangnya kesadaran moral dalam memproduksi dan menyebarkan informasi. Integrasi perspektif filsafat dan Islam memperlihatkan bahwa teori korespondensi, koherensi, pragmatis, dan konsensus memiliki titik temu dengan prinsip *tabayyun*, penggunaan akal, *syura*, *sidq*, amanah, keadilan, dan kemaslahatan. Berdasarkan sintesis tersebut, kebenaran komunikasi perlu dibangun melalui empat dimensi yang saling berkaitan, yaitu kebenaran faktual, rasional, dialogis, dan etis-transendental. Dengan demikian, informasi yang benar tidak cukup hanya akurat, tetapi juga harus logis, terbuka terhadap pengujian, disampaikan secara jujur, serta diarahkan untuk mencegah kerusakan dan mewujudkan kemaslahatan sosial.

Kekuatan penelitian ini terletak pada kontribusi konseptualnya dalam mempertemukan filsafat komunikasi dan epistemologi Islam dalam satu kerangka analitis yang terstruktur. Penelitian ini tidak hanya menyajikan data literatur mengenai teori kebenaran, komunikasi digital, dan etika komunikasi Islam, tetapi juga mengembangkan model integratif yang dapat digunakan untuk menilai kualitas informasi secara multidimensional. Kontribusi keilmuannya tampak pada pengembangan empat konsep utama, yaitu kebenaran faktual untuk menguji akurasi dan autentisitas informasi, kebenaran rasional untuk menilai konsistensi argumentasi, kebenaran dialogis untuk mengukur keterbukaan terhadap kritik, serta kebenaran etis-transendental untuk menilai



niat, keadilan, amanah, dan dampak sosial komunikasi. Pendekatan ini memperluas kajian ilmu komunikasi yang selama ini cenderung memisahkan persoalan epistemologi dari etika. Selain itu, penelitian ini menghasilkan pertanyaan baru mengenai bagaimana prinsip *tabayyun*, *syura*, amanah, dan kemaslahatan dapat dioperasionalkan dalam tata kelola platform digital, praktik jurnalistik, pendidikan literasi media, dan pengembangan kecerdasan buatan. Model yang dirumuskan dapat menjadi dasar bagi pengembangan instrumen penelitian dan kebijakan komunikasi pada masa mendatang.

Keterbatasan penelitian ini terutama berkaitan dengan penggunaan riset kepustakaan yang menjadikan teks dan dokumen sebagai unit analisis. Penelitian belum menguji secara empiris bagaimana keempat dimensi kebenaran tersebut dipahami dan diterapkan oleh jurnalis, pengguna media sosial, pendidik, lembaga keagamaan, pengelola platform, atau pengembang kecerdasan buatan. Sumber yang dianalisis juga berasal dari tradisi filsafat dan Islam tertentu sehingga belum mencakup seluruh keragaman perspektif epistemologis, mazhab pemikiran Islam, maupun konteks budaya komunikasi yang berbeda. Selain itu, model integratif yang dihasilkan masih bersifat konseptual dan belum diterjemahkan menjadi indikator pengukuran, instrumen evaluasi, atau prosedur operasional yang telah diuji validitas serta reliabilitasnya. Penelitian selanjutnya perlu menggunakan studi kasus, wawancara, survei, eksperimen, analisis konten digital, atau metode campuran untuk menguji penerapan model dalam situasi komunikasi nyata. Kajian lanjutan juga perlu membandingkan penggunaan model pada berbagai platform, kelompok sosial, dan lingkungan kelembagaan agar diperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai efektivitas, batas penerapan, dan kemungkinan penyempurnaan model kebenaran komunikasi tersebut.



DAFTAR PUSTAKA

1. Aïmeur, E., Amri, S., & Brassard, G. (2023). Fake news, disinformation and misinformation in social media: a review. *Social Network Analysis and Mining*, 13(1), 30. <https://doi.org/10.1007/s13278-023-01028-5>
2. An-Naim, A. A. (2010). Islam and secularism. In *Comparative Secularisms in a Global Age* (pp. 217–228). <https://doi.org/10.1057/9780230106703>
3. Audi, R. (2010). Epistemology: A contemporary introduction to the theory of knowledge. In *Epistemology: A Contemporary Introduction to the Theory of Knowledge* (4th ed.). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780203846469>
4. Biesta, G. (2010). Pragmatism and the Philosophical Foundations of Mixed Methods. *The SAGE Handbook of Social Work*, 71(1), 1–17. https://scholar.google.com/scholar_lookup?title=Pragmatism+and+the+philosophical+foundations+of+mixed+methods+research&author=Biesta,+Gert&publication_year=2010&pages=95-117%0Ahttps://scholar.google.com/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=+Pragmatism+and+the+philo
5. Bowen, G. A. (2009). Document analysis as a qualitative research method. *Qualitative Research Journal*, 9(2), 27–40. <https://doi.org/10.3316/QRJ0902027>
6. Braun, V., & Clarke, V. (2019). Reflecting on reflexive thematic analysis. *Qualitative Research in Sport, Exercise and Health*, 11(4), 589–597. <https://doi.org/10.1080/2159676X.2019.1628806>
7. Clark, S., & Lewandowsky, S. (2026). The continued influence of AI-generated deepfake videos despite transparency warnings. *Communications Psychology*, 4(1). <https://doi.org/10.1038/s44271-025-00381-9>
8. Craig, R. T. (1999). Communication theory as a field. *Communication Theory*, 9(2), 119–161. <https://doi.org/10.1111/j.1468-2885.1999.tb00355.x>
9. Groh, M., Sankaranarayanan, A., Singh, N., Kim, D. Y., Lippman, A., & Picard, R. (2024). Human detection of political speech deepfakes across transcripts, audio, and video. *Nature Communications*, 15(1). <https://doi.org/10.1038/s41467-024-51998-z>
10. Hassan, H. M., & Salleh, M. A. M. (2022). Parents' Perception Regarding The Opportunities and Risks of Internet Use on Adolescents. *Jurnal Komunikasi: Malaysian Journal of Communication*, 38(2), 144–163. <https://doi.org/10.17576/JKMJC-2022-3802-09>



11. Heer, N., & Nasr, S. H. (1993). Knowledge and the Sacred. In *Philosophy East and West* (Vol. 43, Issue 1). State University of New York Press. <https://doi.org/10.2307/1399476>
12. Kearney, R. (1988). Moral Consciousness and Communicative Action. In *Philosophical Studies* (Vol. 32). Polity Press. <https://doi.org/10.5840/philstudies19883213>
13. Krippendorff, K. (2022). Content Analysis: An Introduction to Its Methodology. In *Content Analysis: An Introduction to Its Methodology* (4th ed.). SAGE Publications. <https://doi.org/10.4135/9781071878781>
14. Littlejohn, S. W., & Foss, K. A. (2008). *Theories of Human Communication* (12th ed.). Waveland Press. <http://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=r3Fk0aRpJM4C&pgis=1>
15. McIntyre, L. (2018). *Post-Truth*. MIT Press.
16. McLoughlin, K. L., Brady, W. J., Goolsbee, A., Kaiser, B., Klonick, K., & Crockett, M. J. (2024). Misinformation exploits outrage to spread online. *Science*, 386(6725), 991–996. <https://doi.org/10.1126/science.adl2829>
17. Moreno Esparza, G. A. (2015). Communication Power. In *Comunicación y Sociedad* (2nd ed., Issue 15). Oxford University Press. <https://doi.org/10.32870/cys.v0i15.1148>
18. Page, M. J., McKenzie, J. E., Bossuyt, P. M., Boutron, I., Hoffmann, T. C., Mulrow, C. D., Shamseer, L., Tetzlaff, J. M., Akl, E. A., Brennan, S. E., Chou, R., Glanville, J., Grimshaw, J. M., Hróbjartsson, A., Lalu, M. M., Li, T., Loder, E. W., Mayo-Wilson, E., McDonald, S., ... Moher, D. (2021). The PRISMA 2020 statement: An updated guideline for reporting systematic reviews. *PLoS Medicine*, 18(3), 1–15. <https://doi.org/10.1371/JOURNAL.PMED.1003583>
19. Parhan, M. et. al. (2022). Tabayyun dan Etika Komunikasi Islam di Era Disrupsi Informasi. *Jurnal Komunikasi Islam Dan Sosial Digital*, 10(2), 178–185.
20. Scott, S. E., & Rozin, P. (2020). Actually, natural is neutral. *Nature Human Behaviour*, 4(10), 989–990. <https://doi.org/10.1038/s41562-020-0891-0>
21. Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. *Journal of Business Research*, 104, 333–339. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039>
22. Tanjung, A., Kholil, S., & Efendi, E. (2023). Communication Ethics of Medan Journalists In Implementing The Tabayyun Attitude In The Digital Era (Islamic Education Communication Perspective). *Edukasi Islami*, 12(3), 14.



<https://www.jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/ei/article/view/5388>

23. UNESCO. (2024). Guidelines for the governance of digital platforms: safeguarding freedom of expression and access to information through a multi-stakeholder approach (nep). In *Guidelines for the governance of digital platforms: safeguarding freedom of expression and access to information through a multi-stakeholder approach (nep)*. UNESCO. <https://doi.org/10.58338/nout7356>
24. Vosoughi, S., Roy, D., & Aral, S. (2018). The spread of true and false news online. *Science*, 359(6380), 1146–1151. <https://doi.org/10.1126/science.aap9559>
25. Wardle, C. & Hossein, D. (2017). Information Disorder: Toward an interdisciplinary framework for research and policy making. In *Report to the Council of Europe* (Issue September 2017). Council of Europe. <https://rm.coe.int/information-disorder-toward-an-interdisciplinary-framework-for-research/168076277c>
26. WEF. (2024). Global Risks Report 2024 (19th Edition). In *World Economic Forum*. World Economic Forum. <https://www.weforum.org/publications/global-risks-report-2024/>
27. Whittemore, R., & Knafl, K. (2005). The integrative review: Updated methodology. *Journal of Advanced Nursing*, 52(5), 546–553. <https://doi.org/10.1111/j.1365-2648.2005.03621.x>

